BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Beberapa Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Peran Kiai di Dalam Politik

Dari hasil penelitian tentang pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya maka diperoleh data dari masing-masing dosen sebagai berikut:

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama	:	AS
Umur	:	32 tahun
Pendidikan terakhir	:	S2 PMIH UNLAM
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Kewiraan dan Ilmu Politik
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Sultan Adam komplek Awang Permai I RT. 14 No. 31 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Ketika ditanya mengenai pendapat beliau tentang setuju atau tidak ketika kiai masuk dalam politik praktis, beliau menjawab setuju, menurut beliau masuknya kiai di dalam politik membawa warna baru, dan ia bisa memecahkan

solusi ketika ada permasalahan mengenai agama. Dan di dalam politik tidak membedakan orang dari mana latar belakangnya, yang penting mempunyai kemampuan.

Kiai tidak salah ikut partai. yang salah itu apabila kiai terjerat masalah keduniawian seperti ikut korupsi ramai-ramai dengan teman separtainya. Menurut beliau kiai sangat perlu ikut berpolitik, disebabkan kiai sebagai penengah apabila ada konflik dan memberikan ceramah kepada teman-teman separtai supaya damai. Serta memecahkan kebuntuan apabila ada konflik di masyarakat yang menyangkut berbau ras atau agama. Karena salah satu fungsi partai diantaranya adalah menyelesaikan konflik di masyarakat.

Beliau berpendapat bahwa peran kiai di dalam politik bisa memajukan partai dalam pemenangan pemilu dan memecahkan konflik, baik internal partai juga di masyarakat yang berkaitan dengan masalah ras atau agama.

2. Responden Kedua

a. Identitas Responden

Nama	:	Ru
Umur	:	45 tahun
Pendidikan terakhir	:	S2 IAIN Syarif Hidayatullah
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Tafsir Ayat Siyasah A dan Tafsir Ayat Siyasah B
Jenis kelamin	:	Laki-laki

Alamat : Jl. Manunggal II RT. 28 Gang IX No. 66 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Dalam hal ini beliau tidak menyatakan secara langsung apakah setuju atau tidak ketika kiai masuk dalam ranah politik praktis. Beliau mengatakan bahwa setuju atau tidak setuju tergantung tujuan kiai tersebut masuk partai politik. yakni bagaimana kiai tersebut memaknai partai politik tersebut dan juga tergantung visi dan misi partai politik yang dimasuki kiai.

Beliau mengingatkan hendaknya sang kiai memperhatikan sosio kultural dimana kiai tersebut berada dan menyampaikan tugas utama kiai yaitu:

a. Menyampaikan ajaran Alquran.
b. Menjelaskan ayat-ayat Alquran.
c. Memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat.
d. Memberikan contoh pengalaman.

Selama tujuan dan aktivitasnya benar, maka tidak ada yang salah ketika kiai berpolitik. Memang kiai perlu untuk berpolitik, tetapi sebaiknya lebih banyak kiai yang konsen dengan tugas utamanya tersebut.

3. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama : ZM

Umur : 34

Pendidikan terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS (Dosen Fakultas Syariah)

Mata kuliah yang diajarkan	:	Fiqih Siyasah A dan Fiqih Siyasah B
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Kenanga komplek Griya Sekumpul Raya II Blok G No. 26 Desa Indrasari Martapura

b. Pendapat Responden

Beliau setuju ketika kiai masuk dalam ranah politik praktis, kiai dalam kapasitanya sebagai seorang figur dan tokoh agama mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat dalam upaya menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

kiai yang ikut berperan dalam politik praktis sangat bagus apabila dilakukan dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena politik merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan, maka kekuasaan tersebut harus bisa dijadikan alat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana sabda Nabi "*apabila engkau melihat sebuah kemunkaran, maka robahlah kemunkaran tersebut dengan kekuasaan yang engkau miliki, apabila tidak bisa dengan perkataan dan ucapan, apabila tidak juga cukup dengan hati*". Dalam hal ini kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik praktis karena apabila demikian, sangat rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun kekuasaan yang akan dicapai harus dijadikan sebagai alat atau sarana untuk tujuan yang lebih mulia.

Bagi partai politik yang dimasukinya, kiai yang dengan kewibawaan dan kharismatiknya tentu saja memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi

eksistensi sebuah partai politik, terutama ketika masyarakatnya adalah masyarakat yang religiusnya tinggi dan sangat menghormati kiai sebagai figur agama. Bagi masyarakat, seorang kiai yang kharismatik dan berwibawa tentu saja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Masyarakat akan sangat menghormati dan respek dan selalu mendengar petuah kiai tersebut.

Tidak ada yang salah apabila kiai berpolitik, karena tidak ada larangan yang pasti dari nash yang melarang kiai untuk berpolitik, bahkan sangat mulia apabila tujuan (niat) dari berpolitik adalah untuk dakwah dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan ber negara. Namun sangat tidak etis apabila kiai hanya berpolitik untuk mencari popularitas individu dan materi, karena tidak sesuai dengan figure keulamaannya sebagai pewaris para nabi.

Apabila kiai hanya sekedar menjadi alat untuk mengeruk suara, maka dalam hal ini kiai janganlah ikut terlibat politik praktis. Karena dalam hal ini kiai tidak mempunyai peran yang sangat signifikan dalam upaya dakwah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kiai hanya dijadikan alat untuk menggali dukungan. Oleh karena itu sifatnya sementara, tidak permanen sehingga apabila peran kiai sudah tidak diperlukan lagi oleh partai, maka suara dan posisi kiai dalam partai itu akan ditinggalkan.

Kiai dalam politik harus mempunyai sikap yang jelas, komitmen yang tinggi terhadap upaya dakwah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Politik jangan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir kekuasaan saja, akan tetapi politik harus dijadikan sarana untuk menuju tujuan akhir sesungguhnya

yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam masyarakat, berbangsa dan ber negara. Dengan demikian kekuasaan hanya menjadi alat bukan tujuan akhir. Dalam praktiknya tentu saja seorang kiai harus menampilkan cara dan etika berpolitik yang santun yang tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Tujuan dalam berpolitik dalam Islam itu jelas yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun dalam implementasi tentu saja harus sejalan dengan norma-norma keIslaman. Oleh karena itu seorang kiai dalam berpolitik harus menampilkan keulamaan yag sesuai dengan kapasitas dirinya sebagai figur atau tokoh agama yang mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat.

4. Responden Keempat

a. Identitas Responden

Nama	:	MW
Umur	:	35
Pendidikan terakhir	:	S2 UI Jakarta
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Sistem Politik Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Padat Karya komplek Herlina Perkasa Blok Teratai RT. 25 No. 50 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Beliau setuju ketika ada seorang kiai yang berperan di dalam politik praktis, karena kiai juga sebagai warga negara terlepas dari predikat beliau sebagai tokoh agama dan beliau adalah bagian dari pada warga negara maka dia mempunyai hak politik

Eksistensi kiai itu sebagai penjaga moral, tentu interpensi kiai dalam masalah politik itu agar menjaga bagaimana politik itu bisa berjalan dengan baik. Karena selama ini kita kenal bahwa politik itu misalnya jahat, politik itu kotor, politik itu penuh dengan kekerasan maka dianggap dengan adanya keterlibatan kiai di dalam politik itu diharapkan sebagai benteng moral bagi para politikus.

Keterlibatan kiai di dalam politik praktis bisa mempunyai pengaruh bisa juga tidak. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi masyarakat. Tetapi di era reformasi ternyata peran kiai di dalam politik tidak begitu besar/signifikan pengaruhnya.

Tidak ada yang salah ketika kiai itu berpolitik, karena politik itu bagian dari pada agama. Kalau kita mempunyai paham bahwa agama itu sebagai *rahmatan lil 'alamin* pengaturan tentang masalah sosial dan politik itu bagian dari pada agama. Jadi agama tanpa berkuasa itu nihil, kekuasaan itu memang harus di pegang oleh orang-orang yang beragama. Kiai selama tujuannya itu baik, ingin mensejahterakan rakyat menjaga moral politik itu bagus dan perlu, kita memang menghendaki kiai itu harus terlibat langsung di dalam politik agar keberadaannya diharapkan sebagai benteng moral.

5. Responden kelima

a. Identitas Responden

Nama	:	BA
Umur	:	50
Pendidikan terakhir	:	S2 Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Perdata
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Hukum Acara Peradilan Agama, dan Hukum Acara
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti RT. 28 Batola.

b. Pendapat Responden

Beliau berpendapat kalau kiai itu masuk ke ranah politik, setuju saja dan bagus kiai itu bisa dijadikan panutan. Paling tidak anggota-aggota partai politik yang lain bisa mengikuti perilaku seorang kiai. Bagi masyarakat keterlibatan kiai tersebut mungkin mereka bisa mengharapkan sesuatu dari kiai, paling tidak kiai itu diharapkan dakwah terhadap partai politik sehingga perilaku-perilaku politik yang dijalankan oleh sebuah partai politik itu bisa mengarah kepada kebenaran-kebenaran atau nilai-nilai keagamaan yang dibawa oleh seorang kiai.

Seorang kiai apabila masuk terlibat di dalam partai politik itu paling tidak seorag kiai mampu memberikan warna terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah partai politik, ketika ia berada di lembaga-lembaga politik dapat

menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai-nilai keagamaan yang tinggi yang sesuai dengan sifat atau keadaan masyarakat yang agamis. Nilai-nilai keagamaan bisa dimasukkan ke dalam kompromi-kompromi politik, misalnya di daerah dalam menghasilkan perda bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Setidaknya nilai keagamaan bisa dijadikan materi pokok bukan materi suplemen atau alternatif agar ketika perda itu dikeluarkan tidak bertentangan di masyarakat.

Kalau kiai ikut dalam ranah politik sepertinya masyarakat menganggap bahwa kiai sudah terkontaminasi dengan nilai-nilai keduniawian yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga anggapan mereka tidak bisa lagi dijadika panutan di masyarakat.

Secara normatif, secara yuridis formal dan secara keagamaan tidak ada yang salah apabila kiai masuk atau berpolitik. Tetapi terkadang nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat bahwa ada segelintir masyarakat yang menghendaki agar kiai itu tidak perlu berpolitik, tugas utamanya adalah dakwah dalam artian melindungi umat, siapapun dia, partai apapun dia, itu tetap diberikan dakwah.

Oleh karenana kiai perlu berpolitik. Tetapi tidak semuanya, melainkan kiai yang mempunyai wawasan dan pandangan yang luas. Paling tidak untuk bisa mengawal perilaku anggota-anggota partai politik, mengawal produk-produk politik sehingga produk-produk yang dihasilkan mempunyai nilai-nilai keagamaan dan dapat diterima oleh masayarakat sesuai dengan sifat atau keadaan dan kondisi masyarakat dan niat kiai itu harus *amar ma'ruf nahi munkar*.

Apabila ada kiai yang dimanfaatkan oleh partai politik tertentu itu sah-sah saja kalau kiainya mau. Ini merupakan salah satu kiat untuk bisa memeroleh dukungan, karena kiai dapat mengunakan bahasa-bahasa agama yang bisa menyentuh masyarakat.

Terkait dengan bagaimana peran kiai di dalam politik kalau dilihat dari sejarah sangat besar, dalam rangka memerdekakan bangsa kita. Ini dapat kita lihat di dalam UUD 1945 bagian pembukaan yang mana kiai ikut berperan dalam merumuskan pancasila seperti yang termaktub dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

6. Responden Keenam

a. Identitas Responden

Nama	:	BRH
Umur	:	32
Pendidikan terakhir	:	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Hadis Ahkam Siyasah A dan Kapita Selekta Politik Islam
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Komplek Pengambangan Indah Blok D No. 2 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Beliau beranggapan sebaiknya kiai berada diluar wilayah politik praktis. Karena tidak semua kiai piawai dalam berpolitik, karena kebanyakan kiai itu latar

belakangnya bukan orang pemerintahan, bukan orang birokrasi, dia masuk ke partai politik hanya karena dukungan sehingga kiai yang seperti ini ketika duduk dalam wilayah politik dia tidak mengerti. Tetapi apabila kiai itu mampu dan mempunyai kafabilitas di dalam manajemen pemerintahan (mengerti politik) itu bagus dan akan lebih baik lagi. Tetapi yang demikian itu sangat jarang sekali.

Kalau kiai ikut berperan dalam politik praktis maka akan menimbulkan tanggapan miring di masyarakat. Jadi sebaiknya kiai itu sebagai kontrol sosial saja, sebagai pegayom umat dalam bidang keagamaan dan tidak usah terlibat di dalam masalah politik praktis. Karena berdasarkan realitas yang ada ketika seorang kiai itu berperan langsung dalam politik praktis, itu akan menimbulkan dampak krisis kepercayaan bagi masyarakat terhadap kiai tersebut.

Ketika kiai berperan dalam politik praktis, yakni masuk dalam partai politik tertentu maka akan mendongkrak popularitas partai tersebut sehingga menjadi suatu keuntungan bagi partai. Sedangkan dampak bagi kiai itu boleh jadi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kiai dan keulamaannya akan dipertanyakan.

Tidak ada yang salah ketika kiai berperan dalam politik praktis, karena itu merupakan haknya sebagai warga masyarakat dalam mengaspirasikan haknya di dalam politik dan juga merupakan hak sebagai warga negara. Tetapi tidak perlu langsung berpolitik praktis. Lebih baik pada posisi netral saja yakni dalam hal memandu umat dan kontrol terhadap pemerintah.

Kampanye politik sebenarnya dilarang membawa simbol-simbol keagamaan, seperti dilakukan di mesjid, membawa tokoh-tokoh agama, dan bagi

beliau tokoh agama itu adalah simbol agama. itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik karena memberikan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat. Oleh karenanya kiai harus bisa menetralkan diri itu akan lebih baik dan jangan mau dimanfaatkan.

Peran kiai di dalam politik harus memegang prinsip menjunjung kemaslahatan umat, hal ini bisa berupa dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau undang-undang. Karena mereka mempunyai hak semacam regulasi. Kiai harus bisa memanfaatkan lembaga yang dimasukinya untuk bisa di setir sesuai dengan asas manfaat kepentingan umat, jangan terbawa oleh kepentingan.

7. Responden Ketujuh

a. Identitas Responden

Nama	:	HN
Umur	:	37
Pendidikan terakhir	:	S2 UII Jokjakarta
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Pengantar Ilmu Hukum
Jenis kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	KayuTangi Jalur 2 No.76 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Beliau tidak setuju ketika kiai masuk dalam ranah politik praktis, menurut beliau politik praktis biar hanya menjadi ranah politisi saja. Kiai seharusnya tetap menjalankan tugasnya kepada umat sehingga ia tidak perlu untuk ikut berpolitik.

Cukup untuk berperan di masyarakat karena kiai sebagai panutan bagi masyarakat.

8. Responden Kedelapan

a. Identitas Responden

Nama	:	HGM
Umur	:	45
Pendidikan terakhir	:	S2 Ilmu Hukum UNAIR Surabaya
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Hukum Tata negara
Jenis kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Permata Raya I No. 56 RT. 10 Handil Bakti Batola.

b. Pendapat Responden

Beliau setuju ketika kiai masuk dalam ranah politik praktis, karena setiap orang berhak untuk ikut di ranah politik. Kalau kiai masuk dalam partai politik tentunya bisa menaikkan popularitas partai tersebut. Dan kalau untuk masyarakat pengaruhnya adalah masyarakat akan tertarik karena ada kiai di partai politik tersebut dan masyarakat bisa memilih partai politik yang di dalamnya ada kiai.

Tidak ada yang salah kiai berpolitik, asal jangan menjual ayat-ayat untuk kepentingan politik, agama jangan dijual murah untuk kepentingan politik. Kalau kiai hanya dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendulang suara yang besar (menarik simpati masyarakat) apalagi dengan mempolitisir agama, sebaiknya kiai

tidak usah ikut berpolitik. Kiai berperan di partai politik harus sesuai dengan ajaran agama, jangan larut dalam politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

9. Responden Kesembilan

a. Identitas Responden

Nama	:	IA
Umur	:	36
Pendidikan terakhir	:	S2 Hukum Islam
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Hadis Ahkam Siyasah B dan Sejarah Politik Islam
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah RT. 15 No. 127 Banjarmasin.

b. Pendapat Responden

Secara pribadi beliau setuju saja kalau ada seorang kiai yang terlibat di dalam politik praktis, dengan catatan kredibilitas sang kiai tidak rusak oleh citra politik saat itu. Sebagai warga negara dia mempunyai hak dan kesempatan yang sama, dan bagus beliau masuk ke politik praktis, apalagi sebelumnya beliau mampu menggalang masa, pengikutnya banyak asal dengan tujuan politik itu sebagai sarana dakwah dan dakwah itu segmentasi bisa di perluas ke ranah politik praktis dengan catatan tidak mengurangi kewibawaan atau kredibilitas kiai itu sendiri dengan posisi politik yang berlangsung di sekitar dirinya.

Keterlibatan kiai di dalam partai politik itu suatu keuntungan bagi partai. Karena bagaimanapun yang namanya kiai itu memiliki status sosial yang elit khususnya bagi masyarakat Jawa, terkait masalah apakah ada yang salah ketika kiai berpolitik, bahwa menurut sebagian orang yang berpendapat bahwa situasi politik di Indonesia tidak cocok untuk seorang kiai, dengan maraknya praktik korupsi selama ini, dikhawatirkan kredibilitas kiai akan terganggu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa memang sudah seharusnya kiai itu terlibat di dalam politik untuk memperbaiki citra politik dan memberikan contoh yang baik.

Perlu atau tidaknya keterlibatan kiai di dalam politik itu dilihat dari konteksnya. Selama penerimaan masyarakat itu baik maka tidak masalah. Tetapi kalau keberadaan peran kiai di dalam partai politik itu aka menurunkan kredibilitasnya sebagai seorang kiai di mata para pengikutnya itu lebih baik tidak usah masuk ke sana. Karena orang yang kehilangan figur itu jauh lebih berbahaya.

Apabila ada seorang kiai yang dimanfaakan dalam kepentingan pemilu, kalau di dalam politik *bergaining* atau tawar menawar itu biasa, kiai harus pintar dalam menggunakana kesempatan dan jangan mudah di manfaatkan. Misalnya ada partai yang ingin memanfaatkan maka kiai harus bisa memanfaatkan situasi politik yang ada sehingga itu berguna bagi kepentingan dakwah dan untuk mengembangkan kepentingan umat.

Kiai seharusnya berperan di dalam politik itu disesuaikan dengan karakter sosial sekarang ini, maka: Pertama; Dia seharusnya menjadi contoh bagi yang lain bagaimana berpolitik sehat yang tidak merugikan orang lain. Kedua; Apabila kiai memegang jabatan politis yang strategis maka sang kiai harus benar-benar

mengoptimalkan posisinya terutama bagi kepentingan umat, tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan.

10. Responden Kesepuluh

a. Identitas Responden

Nama	:	AH
Umur	:	53
Pendidikan terakhir	:	S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Syariah)
Mata kuliah yang diajarkan	:	Filsafat Politik, Sosiologi Hukum
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Bumi Jaya RT. 10 N0. 29 Pemurus Baru.

b. Pendapat Responden

Berpolitik itu merupakan hak semua orang, maka siapapun boleh masuk partai, tidak memandang apakah dia kiai dan sebagainya. Tetapi kalau mengenai setuju atau tidaknya beliau melihatnya netral saja, tergantung situasi dan kondisi yang ada, apakah seorang kiai mampu memberikan makna terhadap praktik politik yang ada sekarang ini atau tidak. Kalau kiai mempunyai integritas yang bagus, mungkin kiai bisa mempengarui dan memperbaiki kondisi politik yang ada terutama ketika ia masuk kedalam partai politik.

Mungkin ketika kiai masuk ke dalam politik praktis ada alasannya, Tapi idealnya sesuai dengan fungsi dan kedudukan ulama sebagai pewaris para nabi, dimana posisinya sebagai orang yang terhormat, maka janganlah memakai baju

ulama untuk masuk ke politik kalau memang ia tidak mampu untuk memberikan perubahan yang signifikan sesuai dengan keulamaannya.

Belum tentu partai politik yang dimasuki oleh kiai popularitasnya akan naik, begitu juga dengan kiai. Di masyarakat bisa jadi tidak populer lagi ketika ia masuk dalam partai politik.

Kalau melihat keadaan yang sekarang ini saya menilai bahwa sama saja ketika kiai masuk partai dibanding dengan artis masuk partai, yaitu sama-sama ingin menarik dukungan dari masyarakat, tapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kiai sudah terjun ke dunia politik seharusnya ia bisa mempengaruhi praktik politik yang ada, dalam artian bisa membawa kepada politik yang mencerahkan, politik yang beretika, santun dan tidak berpolitik uang dan sebagainya.

Matriks
Pendapat Beberapa Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Terhadap Peran Kiai di Dalam Politik

No	Responden	Pendapat	Alasan
1	Pertama	Setuju	Karena di dalam politik tidak membedakan orang dari mana latar belakangnya, yang penting mempunyai kemampuan dan masuknya kiai di dalam politik membawa warna baru, dan ia bisa memecahkan solusi ketika ada permasalahan mengenai agama.
2	Kedua	Tergantung tujuan	Kalau tujuannya untuk berkiprah manata kehidupan sosial dan keagamaan saya setuju, tapi kalau tujuannya hanya untuk materi saya kurang setuju. Dan perlu di ingat bahwa peran kiai di masyarakat adalah pengganti peran Nabi, yakni: menyampaikan ajaran Alquran, menjelaskan ayat-ayat Alquran, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, memberikan contoh pengalaman.
3	Ketiga	Setuju	Karena tidak ada larangan yang pasti dari nash yang melarang kiai untuk berpolitik, selain itu kiai dalam kapasitanya sebagai seorang figur dan tokoh agama mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat dalam upaya menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.
4	Keempat	Setuju	Karena Kiai juga sebagai warga negara terlepas dari predikat beliau sebagai tokoh agama dan beliau adalah bagian dari pada warga negara maka dia mempunyai hak politik dan seharusnya kiai itu harus terlibat langsung di dalam politik agar keberadaannya diharapkan sebagai benteng moral agar politik bisa berjalan dengan baik.
5	Kelima	Setuju	Secara normative, secara yuridis formal dan secara keagamaan tidak ada yang salah apabila kiai masuk atau berpolitik. Dengan terlibatnya kiai dalam politik diharapkan mampu mengawal perilaku anggota-anggota partai politik, dan produk-produk politik sehingga produk-produk yang dihasilkan mempunyai nilai-nilai keagamaan dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sifat atau keadaan dan kondisi masyarakat dan niat kiai itu harus *amar ma'ruf nahi munkar*.

6	Keenam	Tidak setuju	Karena tidak semua kiai piawai dalam berpolitik, karena kebanyakan kiai itu latar belakangnya bukan orang pemerintahan, bukan orang birokrasi, dia masuk ke partai politik hanya karena dukungan sehingga kiai yang seperti ini ketika duduk dalam wilayah politik dia tidak mengerti. Sehingga sebaiknya kiai itu sebagai kontrol sosial saja, sebagai pegayom umat dalam bidang keagamaan dan tidak usah terlibat di dalam masalah politik praktis.
7	Ketujuh	Tidak setuju	Karena politik praktis biar hanya menjadi ranah politisi saja. Dan kiai seharusnya tetap menjalankan tugasnya kepada umat dengan menjadi panutan bagi masyarakat.
8	Kedelapan	Setuju	Karena setiap orang berhak untuk ikut di ranah politik, namun harus sesuai dengan ajaran agama, jangan larut dalam politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam
9	Kesembilan	Setuju	Karena sebagai warga negara dia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan catatan tidak mengurangi kewibawaan dan kredibilitas kiai, dengan masuknya kiai diharapkan bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk berpolitik sehat yang tidak merugikan orang lain.
10	Kesepuluh	Netral	Tergantung situasi dan kondisi yang ada, apakah seorang kiai mampu memberikan makna terhadap praktik politik yang ada sekarang ini atau tidak. Dan apabila kiai sudah masuk dalam dunia politik seharusnya ia bisa mempengaruhi praktik politik yang ada, dalam artian bisa membawa kepada politik yang mencerahkan, politik yang beretika, santun dan tidak berpolitik uang dan sebagainya.

B. Analisis Pendapat Beberapa Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Peran Kiai di Dalam Politik

Berdasarkan penyajian data mengenai pendapat beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Keterlibatan kiai di dalam politik ternyata memang masih manuai pro dan kontra, bukan hanya di kalangan masyarakat secara umum tetapi juga di kalangan dosen. Akan tetapi perbedaan pendapat dari kalangan dosen tersebut tidak terlalu mencolok, hal ini terlihat dari data yang diperoleh. Dari sepuluh orang responden yang dimintai pendapatnya, ada 6 (enam) orang yang menyatakan dengan tegas bahwa mereka setuju ketika kiai masuk dalam ranah politik, 2 (dua) orang menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa sebaiknya kiai berada di luar wilayah politik praktis dan biar menjadi ranah politisi saja, 1 (satu) orang yang tidak menyatakan secara langsung setuju atau tidaknya dengan melihat terlebih dahulu tujuan dari kiai tersebut masuk dalam ranah politik praktis, dan 1 (satu) orang lagi menyatakan netral dalam menyikapi keterlibatan kiai di dalam politik.

Adapun 6 orang responden yang menyatakan setuju adalah berinisial AS, ZM, MW, BA, HGM, dan IA. Menurut pendapat AS di dalam politik tidak membedakan orang dari mana latar belakangnya, yang penting mempunyai kemampuan, dengan masuknya kiai di dalam politik membawa warna baru, dan ia bisa memecahkan solusi ketika ada permasalahan mengenai agama. Menurut penulis dari pendapat AS ini yang harus digaris bawahi dan yang paling penting adalah kalimat “mempunyai kemampuan”, hal ini memang benar karena

kemampuan merupakan modal utama, bagaimana kiai bisa membawa warna baru kearah yang lebih baik kalau tidak mempunyai kemampuan. Seseorang menjadi kiai bukan hanya karena "*ascribet status*", yang berarti seseorang menjadi kiai bukan hanya karena ayahnya adalah seorang kiai. Akan tetapi lebih karena prestasi pribadi dalam mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya Alquran dan al-hadist, serta mampu hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kompleks akan berbagai macam persoalan, dalam artian mampu memimpin dalam bidang spritual maupun tata kehidupan sosial bermasyarakat.

Kemudian alasan yang dikemukakan oleh ZM dan BA hampir sama, yaitu pada intinya tidak ada larangan yang pasti dari nash yang melarang kiai untuk berpolitik, sehingga secara normatif, secara yuridis formal dan secara keagamaan tidak ada yang salah apabila kiai masuk atau berpolitik, dan pendapat mereka tentang peran kiai di dalam politikpun mempunyai kesamaan yaitu kiai mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat dalam upaya menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Menurut penulis apa yang di kemukakan oleh ZM dan BA ini memang benar, tidak ada suatu dalil atau nash atau ketentuan hukum yang melarang kiai untuk masuk dalam ranah politik dan pendapat yang diungkapkan mereka mengenai peran kiai di dalam politik memang sesuai dengan orientasi kiai berpolitik yaitu untuk tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* diletakkan dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu mengawasi dan mengevaluasi.

Selanjutnya responden yang menyatakan setuju adalah MW, HGM dan IA. Ketiga respoden ini juga mempunyai kesamaan dalam memberikan alasannya,

dimana mereka mendasarkan kepada hak kiai sebagai warga negara terlepas dari predikat beliau sebagai tokoh agama dan beliau adalah bagian dari pada warga negara sehingga dia juga mempunyai hak politik. Menurut penulis alasan yang mereka gunakan ini juga tidak salah, karena semua orang mempunyai hak termasuk hak untuk berpolitik.

Mengenai pendapat mereka tentang peran kiai di dalam politik yang dikemukakan oleh MW adalah kiai berperan sebagai benteng moral agar politik bisa berjalan dengan baik, sementara HGM mengemukakan bahwa peran kiai harus sesuai dengan ajaran agama, jangan larut dalam politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan pendapat IA adalah seharusnya kiai bisa mempengaruhi praktik politik yang ada, dalam artian bisa membawa kepada politik yang mencerahkan, politik yang beretika, santun dan tidak berpolitik uang dan sebagainya. Menurut penulis pendapat mereka ini memang benar dan sesuai dengan salah satu dari Sembilan pedoman berpolitik warga NU bahwa berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati. setidaknya bukan hanya kiai saja yang harus memainkan peran seperti itu, tetapi juga seluruh individu atau elemen politik harus berperan yang demikian sehingga tujuan dari perpolitikan di Indonesia bisa terwujud yakni untuk membawa perubahan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik.

Pendapat berikutnya yang menyatakan tidak setuju ada 2 (dua) orang responden, yaitu yang berinisial BRH dan HN. Menurut BRH tidak semua kiai piawai dalam berpolitik, karena kebanyakan kiai itu latar belakangnya bukan

orang pemerintahan, bukan orang birokrasi, dia masuk ke partai politik hanya karena dukungan sehingga kiai yang seperti ini ketika duduk dalam wilayah politik dia tidak mengerti. Sehingga beliau berpendapat sebaiknya kiai itu sebagai kontrol sosial saja, sebagai pengayom umat dalam bidang keagamaan dan tidak usah terlibat di dalam masalah politik praktis. Dan menurut HN Politik praktis biar hanya menjadi ranah politisi saja, kiai seharusnya tetap menjalankan tugasnya kepada umat dengan menjadi panutan bagi masyarakat. Menurut penulis kedua pendapat ini mempunyai kesamaan, yaitu sama menginginkan kiai cukup berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak ikut dalam dunia perpolitikan. Keterlibatan kiai di dalam politik ternyata memiliki implikasi yang tidak semuanya bernilai positif dan dalam penelitian ini terungkap bahwa tidak semua pengikut kiai memilih terhadap calon yang didukung oleh kiai atau dengan kata lain tidak semuanya ikut mendukung kiai.

Responden yang tidak menyatakan pendapatnya secara langsung setuju atau tidaknya ada 1 (satu) orang, yaitu responden yang berinisial RU, disini beliau berpendapat “kalau kiai tujuannya untuk berkiprah menata kehidupan sosial dan keagamaan saya setuju, tapi kalau tujuannya hanya untuk materi saya kurang setuju”. Jadi beliau melihat dari tujuan kiai itu sendiri. Beliau juga mengingatkan kiai kepada tugas utamanya yaitu menyampaikan ajaran Alquran, menjelaskan ayat-ayat Alquran, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, memberikan contoh pengalaman. Menurut penulis, pernyataan yang diungkapkan oleh responden ini merupakan suatu kewajaran, artinya apabila kiai masuk dalam ranah politik praktis dengan tujuan yang baik tentu sedikit banyaknya akan

mendapatkan respon yang baik, begitu juga sebaiknya. Dan kalau penulis memperhatikan dari pemaparan responden yang mengingatkan kiai kepada tugas utamanya, maka sepertinya beliau lebih menginginkan kiai tidak ikut dalam perpolitikan.

Kemudian ada 1 (satu) orang responden yang menyatakan dirinya netral yaitu responden yang berinisial AH, menurut beliau tergantung situasi dan kondisi yang ada, apakah seorang kiai mampu memberikan makna terhadap praktik politik yang ada sekarang ini atau tidak. Beliau menambahkan seharusnya kiai bisa mempengaruhi praktik politik yang ada, dalam artian bisa membawa kepada politik yang mencerahkan, politik yang beretika, santun dan tidak berpolitik uang dan sebagainya. Menurut penulis apa yang dinyatakan oleh responden AH hampir serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh responden yang berinisial IA, hanya saja beliau menyatakan untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang netral dalam permasalahan peran kiai di dalam politik.

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat terhadap keterlibatan kiai di dalam politik tersebut diatas disebabkan karena masing-masing melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa interpretasi penulis mengenai pernyataan responden yang diperoleh diatas, yakni:

1. Harapan mereka yang tidak setuju dengan kiai masuk di dalam politik
    a. Lebih baik kiai konsen terhadap tugas utamanya di masyarakat, yaitu mewakili peran Nabi untuk:
        1) Menyampaikan ajaran Alquran.
        2) Menjelaskan ayat-ayat Alquran.

3) Memutuskan perkara yang dihadapi di masyarakat.

4) Sebagai panutan dengan memberikan contoh pengalaman.

b. Kiai cukup sebagai kontrol sosial saja, pengayom umat dalam bidang keagamaan dan tidak usah terlibat dalam masalah politik praktis.

2. Harapan mereka yang setuju dengan kiai masuk di dalam politik

a. Dengan masuknya kiai di dalam politik diharapkan bisa sebagai penengah apabila ada konflik dan memberikan ceramah kepada teman separtainya supaya damai.

b. Karena politik merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan, maka dengan keberadaan kiai diharapkan kekuasaan harus bisa dijadikan alat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

c. Keterlibatan kiai di politik diharapkan sebagai benteng moral bagi para politikus.

d. Kiai diharapkan dakwah terhadap partai politik, sehingga perilaku-perilaku politik yang dijalankan oleh sebuah partai politik bisa mengarah kepada kebenaran-kebenaran atau nilai-nilai keagamaan yang dibawa oleh seorang kiai.

e. Kiai diharapkan mampu memberikan warna terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah partai politik. ketika ia berada di lembaga politik dapat menghasilkan produk-produk politik yang mempunyai nilai-nilai keagamaan yang tinggi sesuai dengan sifat atau keadaan masyarakat yang agamis.

f. Diharapkan kiai bisa mempengaruhi praktik politik yang ada, sehingga bisa membawa kepada politik yang mencerahkan, politik yang beretika, santun, tidak berpolitik uang dan sebagainya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya peran kiai di dalam politik harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Adapun peran kiai di dalam politik yang dimaksud adalah:

1. Memajukan partai dalam pemenangan pemilu dan memecahkan konflik baik internal partai juga di masyarakat yang terkait masalah ras dan agama.
2. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
3. Sebagai penjaga moral, agar politik bisa berjalan dengan baik.
4. Mengawal perilaku politik anggota-anggota partai politik.
5. Untuk memperbaiki citra politik dan memberikan contoh yang baik.
6. Sebagai contoh bagi yang lain untuk berpolitik sehat yang tidak merugikan orang lain.